

**IMPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI PEDESAAN TERHADAP KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR
DI KECAMATAN SORKAM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**Sri Ayu Ningsi
Kasyful Mahalli**

ABSTRACT

This study aims to analyze the implication PNPM rural to the availability of infrastructure. The study was conducted in 4 village namely Sorkam, Naipospos Barat, Teluk Roban, and Bottot with the quantity of samples is 91 households. The analysis method that used in this study is descriptive analysis, simple regression analysis, paired sample t test and the measurement scale is likert scale. The descriptive analysis result showed that the implementation of PNPM rural in sorkam is dominantly used for the development and the improvement of basic infrastructure. The simple regression estimation's result showed that impact PNPM rural to the availability of the infrastructure in sorkam is significantly positive. While the paired sample t test showed that the availability of infrastructure has a positive effect on level of people's income in sorkam.

***Keyword:** PNPM-MPd, Availability of the Infrastructure, Income level, Descriptive Analysis, Simple Regression, and Paired Sample t Test.*

PENDAHULUAN

Di era ekonomi global, Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan sumber daya alam dan buruh yang tidak terampil. Permasalahan kemiskinan dapat menghambat pembangunan di Indonesia. Tingkat kemiskinan masih terpusat di wilayah pedesaan. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Indonesia, per maret 2013 di wilayah pedesaan yaitu 17,74 juta jiwa dan di perkotaan sebesar 10,33 juta jiwa. Terhambatnya kegiatan pembangunan infrastruktur akan menurunkan tingkat investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai disuatu daerah akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya, sehingga tercipta lapangan kerja yang pada akhirnya akan memutuskan lingkaran setan kemiskinan. Akan tetapi, dalam pembangunan desa infrastuktur merupakan salah satu kendalanya. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur pedesaan mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk mendapatkan akses yang dibutuhkan. Sehingga infrastruktur yang terbatas menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan adalah melalui PNPM Mandiri yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.

Adapun anggaran yang dialokasi oleh PNPM Mandiri Pedesaan melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kecamatan Sorkam tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alokasi Dana BLM Kecamatan Sorkam Tahun 2011-2013 (Rp Juta)

Tahun	Pembiayaan			
	BLM		Total BLM	Swadaya
	APBN	APBD		
2011	2.400	600	3.000	23,4
2012	2.700	300	3.000	19,6
2013	900	100	1.000	7,3

Sumber: TNP2K dan Laporan Tahunan PNPM-MPd Kecamatan Sorkam, Data diolah

Jenis infrastruktur yang dibangun di kecamatan Sorkam melalui PNPM Mandiri Pedesaan antara lain: pembangunan jalan, berupa (pembukaan, penimbunan, pengerasan dan pengaspalan jalan), gorong-gorong, bendungan dan normalisasi, air bersih dan saluran *drainase*, Tembok Penahan Tanah (TPT), dan pembangunan gedung sekolah serta pengadaan *mobiler* sekolah. Program ini tidak hanya bersifat strategis karena dalam kegiatannya menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) menjadi sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tim Pengendali PNPM Mandiri (tt), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah Program Nasional dalam mewujudkan kerangka kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di wilayah Pedesaan. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan dana stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Menurut Christenson dan Robinson (dalam Soetomo, 2010) *Community Development* adalah sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultur dan lingkungan mereka.

Pola pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan pada saat ini adalah pemberdayaan yang menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya, yaitu pola pemberdayaan yang bersifat *bottom-up intervention* yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan (Emmy, 2014).

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur di daerah tertinggal menghadapi berbagai masalah salah satunya belum optimalnya infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Basri dan Munandar (2009), Infrastruktur merupakan suatu penentu dasar kelancaran dan akselerasi pembangunan. Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang

pembangunan disuatu daerah atau negara. Semakin cepat dan besar suatu pembangunan ekonomi yang akan digerakkan, maka semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, dapat dipastikan kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan tersendat-sendat

Menurut Gie (2002) untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, pembangunan sarana dan prasarana beserta jasa pelayanannya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1. Menciptakan banyak lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung,
2. Menunjang pembangunan ekonomi wilayah,
3. Menciptakan manfaat ekonomis sebesar-besarnya pada masyarakat disekitar proyek infrastruktur, dan
4. Layak secara ekonomis dan finansial sehingga menarik investor dalam maupun luar negeri.

Kebijakan pokok yang ditempuh dalam pembangunan infrastruktur adalah: (1) kebijakan mempertahankan tingkat jasa pelayanan infrastruktur, (2) kebijakan melanjutkan restrukturisasi dan reformasi dibidang infrastruktur, dan (3) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan infrastruktur.

Menurut Gaduh (2010) kurangnya infrastruktur di pedesaan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, karena hal tersebut membatasi pertumbuhan produktif dan merintangai perkembangan modal manusia. Menyadari besarnya peranan pembangunan infrastruktur dalam pengentasan kemiskinan desa mendorong pemerintah pusat dan juga lembaga-lembaga donor untuk mengarahkan bantuan dalam jumlah tertentu guna mendukung proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri terhadap ketersediaan infrastruktur di kecamatan Sorkam dengan menggunakan Skala Likert secara deskriptif kuantitatif. Kemudian menganalisis perkembangan daya beli masyarakat sebelum dan sesudah tersedianya infrastruktur di kecamatan Sorkam. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, regresi sederhana, dan uji beda rata-rata berpasangan (*Paired Sample t Test*).

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah, penelitian dilakukan di 4 desa/kelurahan yang terdiri dari kelurahan Sorkam, desa Naipospos Barat, Teluk Roban Dan Bottot.

Defenisi Operasional

1. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan menciptakan kemandirian dan kesempatan kerja di pedesaan,
2. Ketersediaan infrastruktur merupakan indikator yang dapat memobilisasi sumber daya yang ada dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
3. Tingkat pendapatan merupakan gambaran kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan.

Skala Pengukuran Variabel

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert dengan menyebarkan kuesioner kepada 91 responden.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 1011 kepala keluarga dan sampel sebesar 91 kepala keluarga.

Tabel 1.2
Distribusi Sampel secara Proporsional Random Sampling Tahun 2013

Desa/ Kelurahan Populasi	Jumlah Kepala Keluarga	Alokasi Proporsional	Jumlah Sampel
Naipospos Barat	397	397/ 1011 x 91	36
Sorkam	331	331/ 1011 x 91	30
Teluk Roban	161	161/ 1011 x 91	14
Bottot	122	122/ 1011 x 91	11
Jumlah	1011		91

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan dalam BPS Sumatera Utara, data diolah

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa dokumen yang diperoleh dari kantor kecamatan Sorkam dan kantor kesekretariatan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Sorkam. Data primer diperoleh melalui serangkaian pertanyaan/ pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas perlu dilakukan agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi. Validitas instrumen ditentukan dengan mengorelasikan antara sektor yang diperoleh dari setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Untuk mencari nilai korelasi *Product Moment* maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Untuk menghitung reliabilitas digunakan metode *Spit half* yaitu suatu test yang membelah dua butir-butir pertanyaan atau pernyataan menjadi dua bagian. skor setiap butir pada masing-masing belahan dijumlahkan sehingga menjadi skor total belahan ganjil dan skor total belahan genap. Skor total dari kedua belahan dikorelasikan dengan rumus korelasi *product moment*.

Nilai koefisien korelasi r_{pm} berkisar antara -1 sampai 1 dengan kriteria pemanfaatannya sebagai berikut:

1. Jika $r > 0$; artinya adanya hubungan linier positif yaitu semakin tinggi tingkat pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, maka semakin tinggi pula ketersediaan infrastruktur.

2. Jika $r < 0$; artinya adanya hubungan linier negatif yaitu semakin rendah tingkat pembiayaan dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, maka semakin rendah pula ketersediaan infrastruktur.
3. Jika $r = 0$; artinya tidak ada hubungan sama sekali antara pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap ketersediaan infrastruktur dengan pendapatan masyarakat.
4. Jika $r = 1$ atau $r = -1$; artinya adanya hubungan linier sempurna antara tingkat infrastruktur.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana serta uji beda rata-rata berpasangan (*Paired Sample t Test*).

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Sorkam. sehingga dapat diketahui apa saja jenis kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sudah terlaksana di kecamatan Sorkam.

Analisis Regresi

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menganalisis dampak pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap ketersediaan infrastruktur di kecamatan Sorkam. Dengan model regresi sederhana yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Keterangan:

- Y = Ketersediaan Infrastruktur
- X = Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
- α = Intercept
- β = Koefisien
- e = error term

Paired Sample t Test

Uji beda rata-rata berpasangan digunakan untuk melihat pengaruh dari ketersediaan infrastruktur melalui PNPM Mandiri Pedesaan terhadap tingkat pendapatan masyarakat di kecamatan Sorkam. Dengan melihat perkembangan tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2006 dan Pendapatan masyarakat sesudah adanya PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2013. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{x}_{1i} - \bar{x}_{2i}}{\sqrt{S^2_p \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Keterangan:

- t = Uji Beda
- \bar{x}_{1i} = Rata-rata pendapatan masyarakat sebelum memperoleh alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2006.
- \bar{x}_{2i} = Rata-rata pendapatan masyarakat sesudah memperoleh alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013.
- n_1 = Jumlah responden sebelum memperoleh dana alokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- n_2 = Jumlah responden sesudah memperoleh dana alokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- S^2_p = Simpangan baku berpasangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sorkam

PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan dengan mendorong kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur yang partisipatif.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Sorkam secara langsung ditentukan, dinilai, dilaksanakan, dan diawasi sekaligus dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Pembangunan sarana dan prasarana dasar bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas usaha ekonomi masyarakat agar lebih baik, peningkatan nilai asset (tanah) yang dimiliki, dan pada pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kelurahan Sorkam

Pada tahun 2010, adapun jenis infrastruktur yang dibangun di kelurahan Sorkam adalah pembukaan jalan, penimbunan jalan dan Tembok Penahan Tanah. Dengan alokasi dana BLM sebesar Rp.191.089.900. dan dana swadaya sebesar Rp.1.620.000. Pada tahun 2011, jenis infrastruktur yang dibangun melalui pembiayaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah pengerasan *telford* dan parit beton, dengan pembiayaan sebesar Rp.346.705.000. dari dana BLM dan Rp.2.840.000,- dari swadaya masyarakat.

Pada tahun 2012, jenis infrastruktur yang dibangun melalui pembiayaan PNPM Mandiri Pedesaan kelurahan Sorkam adalah pada tahap I parit beton dan gorong-gorong, dengan pembiayaan BLM sebesar Rp.34.340.000. dan Rp.2.555.000. berasal dari swadaya. Tahap II pembangunan parit beton dengan pembiayaan sebesar Rp.203.556.000. dan swadaya sebesar Rp.1.180.000. Pada tahun 2013, jenis infrastruktur yang dibangun adalah saluran *drainase* dan gorong-gorong dengan pembiayaan BLM sebesar Rp.309.755.000. dan pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp.1.750.000.

Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Naipospos Barat

Pada tahun 2010, jenis infrastruktur yang dibangun di desa Naipospos Barat adalah Pengerasan rabat beton, dengan alokasi dana BLM untuk desa Naipospos Barat sebesar Rp.168.538.000. dan Rp.1.000.000. berasal dari dana swadaya masyarakat. Pada tahun 2011, jenis infrastruktur yang dibangun di desa Naipospos Barat adalah pengaspalan jalan, parit beton, dan beronjong. Adapun pembiayaan BLM sebesar Rp.223.722.000. dan Rp.1.129.000. yang berasal dari swadaya masyarakat. Pada tahun 2012, desa Naipospos Barat melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik berupa pengeringan rawa, pendanaan yang diperoleh dari BLM melalui PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp.293.482.000. dan Rp.2.110.000. berasal dari pendanaan swadaya masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Teluk Roban

Pada tahun 2010, jenis infrastruktur yang dibangun di desa Teluk Roban pada tahap I terdiri dari rehab baru MDA 4 unit dan gedung sekolah 4 unit, dengan biaya pembangunan melalui BLM sebesar Rp.332.310.600 dan 3.195.000 berasal dari swadaya masyarakat. Pada tahun 2011 dilakukan pembangunan Bendungan dan Normalisasi seluas 3300 m³, adapun besarnya pembiayaan melalui PNPM Mandiri Pedesaan yaitu sebesar Rp.344.747.000 dan swadaya sebesar Rp.3.195.000. Pada tahun 2012, jenis infrastruktur yang dibangun melalui

pembiayaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah penimbunan jalan, tembok penahan tanah, beronjong, gorong-gorong dan jembatan. Pembiayaan BLM yang digunakan sebesar Rp. 343.975.000 dan 2.195.000 berasal dari swadaya masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Bottot

Pada tahun 2010, adapun jenis infrastruktur yang dibangun di desa Bottot adalah pembukaan jalan pertanian, pembukaan jalan, tembok penahan tanah dan plat beton. Dengan alokasi dana BLM sebesar Rp.207.034.000 dan Rp.3.480.000 berasal dari swadaya masyarakat. Pada tahun 2011, jenis infrastruktur yang dibangun melalui pembiayaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah pengerasan Pembangunan Madrasyah, dengan biaya sebesar Rp.348.263.000 dan Rp.2.800.000 dari swadaya masyarakat. Pada tahun 2012, adapun infrastruktur yang dibangun melalui pembiayaan PNPM Mandiri Pedesaan terdiri dari pembukaan jalan, tembok penahan tanah dan gorong-gorong. Dengan pembiayaan yang berasal dari dana BLM sebesar Rp.337.854.000 dan Rp.2.345.000 berasal dari swadaya masyarakat yang dikumpulkan oleh Tim Penulis Kegiatan (TPK).

Implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Ketersediaan Infrastruktur

Pada umumnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program pro-rakyat yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat berupa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Pedesaan merupakan usulan dari masyarakat desa yang telah dilakukan penilaian berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD).

Menurut Suyono Dikun (2003) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 60 persen.(Abdul harris, tt). Hal ini disebabkan karena infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian suatu daerah. Secara makro, ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi *marginal productivity of private capital* dan secara mikro dapat mempengaruhi penurunan biaya produksi.

Dalam rangka mengembangkan ketersediaan infrastruktur di wilayah pedesaan melalui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli-Tengah, dapat dilihat dengan menggunakan model regresi sederhana dengan hasil estimasi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hasil Estimasi Dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Ketersediaan Infrastruktur

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,525	2,115		4,503	,000
PNPM-MPd	,709	,066	,749	10,677	,000

Sumber: data primer, diolah

Bedasarkan hasil pengujian estimasi maka dapat disimpulkan bahwa variabel PNPM Mandiri Pedesaan berdampak signifikan secara positif terhadap ketersediaan infrastruktur, dapat dilihat dari nilai $t_{hitung} (10,677) > t_{tabel} (1,987)$ dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai probabilitas menunjukkan nilai $sig (0,000) < \alpha (0,05)$ artinya apabila pembiayaan PNPM Mandiri Pedesaan ditingkatkan 100 persen maka ketersediaan infrastruktur (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 70,9 persen. Nilai beta menunjukkan bahwa besarnya pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan terhadap ketersediaan infrastruktur yaitu sebesar 0,749.

Implikasi PNPM Mandiri Pedesaan terhadap ketersediaan infrastruktur memiliki dampak terhadap ekonomi, sosial dan administratif di kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli-Tengah. Dampak ekonomi yang diperoleh dari pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana adalah mengurangi jarak tempuh ke lokasi pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, meningkatkan harga jual tanah dan meningkatkan fungsi lahan.

Dampak sosial dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang dapat dilihat dari peningkatan nilai konsumsi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, dengan tersedianya infrastruktur fisik berupa perbaikan sanitasi lingkungan dan normalisasi pengairan maka akan tercipta lingkungan yang lebih nyaman.

Dampak administratif yaitu berupa pemekaran jumlah desa/ kelurahan di kecamatan Sorkam, pada tahun 2013 jumlah desa/ kelurahan terdiri dari 1 kelurahan dan 14 desa. Dan pada tahun 2014 jumlah desa/ kelurahan terdiri dari 4 kelurahan dan 19 desa, terdapat 8 desa baru dimekarkan antara lain desa Sorkam Tengah, Sorkam Kiri, Pananggahan, Pagaran Julu, Sihapas, Muara Nauli, Hiteurat dan Nauli. Penguatan kelembagaan masyarakat dan partisipasi keswadayaan masyarakat, Serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program pemberdayaan yang sedang dilaksanakan.

Analisis Pengaruh Ketersediaan Infrastruktur melalui PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat

Perkembangan tingkat pendapatan masyarakat di kecamatan Sorkam telah mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat persentase tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah tersedianya infrastruktur melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di kecamatan Sorkam.

Tabel 1.4
Perkembangan Tingkat Pendapatan Masyarakat
Sebelum dan Sesudah tersedianya Infrastruktur di Kecamatan Sorkam

Tingkat Pendapatan	Persentase		Deviasi
	Sebelum	Sesudah	
< Rp. 500000	49,45	18,68	-30,77
Rp. 600000 - Rp. 1500000	39,56	62,64	23,08
Rp. 1600000 - Rp. 2500000	9,89	10,99	1,10
Rp. 2600000 - Rp. 3500000	1,10	7,96	6,59
Jumlah	100	100	

Sumber: Data Primer, Diolah

Hasil analisis uji beda rata-rata berpasangan (*Paired Sample t Test*) pada tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2006 dan setelah terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2013. Apakah terdapat perbedaan rata-rata pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah tersedianya infrastruktur di kecamatan Sorkam dengan tingkat kepercayaan 95% (alfa 0,05).

Berdasarkan hasil pengujian dari uji statistik diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat dilihat dari nilai t, yaitu $t_{hitung} (9,869) > t_{tabel} (1,987)$ berarti H_0 ditolak (H_a diterima) artinya terdapat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat sebelum tersedianya infrastruktur melalui PNPM Mandiri Pedesaan (tahun 2006) dengan sesudah tersedianya infrastruktur melalui PNPM Mandiri Pedesaan (tahun 2013).

Dengan kata lain setelah bertambahnya infrastuktur fisik melalui PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan, maka terjadi perubahan terhadap tingkat pendapatan masyarakat di kecamatan Sorkam. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai probabilitas sig $(0,000) < \alpha (0,05)$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah tersedianya infrastruktur melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di kecamatan Sorkam.

Tabel 1.5
Hasil Analisis Uji Beda Rata-Rata Berpasangan Ketersediaan
Infrastruktur terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat

Variabel	Mean	t-test	Sig (2-tailed)
-Tingkat pendapatan masyarakat sebelum PNPM Mandiri pedesaan	789780,23		
-Tingkat Pendapatan Masyarakat Sesudah PNPM Mandiri Perdesaan	1102747,25		
-Tingkat pendapatan masyarakat sebelum PNPM Mandiri Perdesaan -Tingkat pendapatan masyarakat sesudah PNPM Mnadiri Perdesaan		-9,837	0,000*
Keterangan *: Tingkat Kepercayaan = 0,05			

Sumber: Data Primer, diolah

Pada tahun 2006 sebelum tersedianya infrastruktur melalui PNPM Mandiri Pedesaan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat sebesar Rp.789.780,23/bulan dan pada tahun 2013 sesudah tersedianya infrastruktur PNPM Mandiri Pedesaan Rp.1.102.747,25/bulan, mengalami kenaikan sebesar Rp.312.967,02/bulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Sorkam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat secara langsung menentukan, menilai, melaksanakan, dan mengawasi sekaligus memanfaatkannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sorkam bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses yang dibutuhkan mereka terutama akses menuju lahan pertanian.
2. Adanya pembiayaan melalui PNPM Mandiri Pedesaan, berdampak positif dan signifikan terhadap ketersediaan infrastruktur di kecamatan Sorkam. Maka apabila pembiayaan PNPM-MPd ditingkatkan 100 persen maka ketersediaan infrastruktur (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 70,9 persen.
3. Terdapat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah tersedianya infrastruktur melalui PNPM Mandiri Pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Garaha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnudin, Andi, 2010. *Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia*. <http://www.untad.a.id/jurnal/index.php/SMARTTEK/article/view/638>(30 Mar.2014)
- Badan Pusat Statistik, 2013. *Statistik Daerah Kecamatan Sorkam 2013*. <http://www.tapanuli Tengah kab. bps.go.id/?hal=publikasi detil&id=214> (04 Apr. 2014)
- Basri, Faisal dan Haris Munandar, 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia (kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktoral Jenderal keuangan, 2013. *Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-daerah*. <http://keuda.Kemendagri.go.Id/ artikel/ detail/ 35 pembangu nan-infrastruk tur -dan-sinergi-pusat-daerah> (12 Mei 2014).
- Emmy, Sovia, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Global*. <http://www.ppsw.or.id/index.php/19-berita-terbaru/204-pemberdayaan-masyarakat-dalam-era-global>. (11 Mei. 2014)
- Fatria, Gita Alfiani, 2010. *Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Stabat Analisis Pengaruh Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap Peningkatan*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Gaduh, Arya, 2010. *Kapasitas Desa dalam Memelihara Infrastruktur Bukti dari Perdesaan Indonesia*. <http://www.pnpm-support.org/id/publication/kapasitas - desa - dalam - memelihara - infrastruktur - bukti - bukti -dari-perdesaan-indonesia> (30 Mar. 2014)
- Gie, Kwik Kian, 2002. *Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman*. <http://www.bappenas.go.id/index.php/...../2255/> (31Mar.2014)
- Harris, Abdul, 2009. *Pengaruh Penatagunaan Tanah terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi*. <http://www.Bappenas.go.id/index.php/pengaruh-penatagunaan-tanah-terhadap-keberhasilan-infrastruk tur-dan-ekonomi/2334/> (7 Jul. 2014)
- Nugraha, et.al, 2013. *Wajah Perekonomian Indonesia dan Prospeknya*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia.
- Paket Informasi, 2012-2013. *Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
- Sanusi, Anwar, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis disertai Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianti, 2011. *SPSS vs LISREL sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwono, Jonathan, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sirojuzilam, 2011. *Problematika Wilayah Kota dan Daerah*. Medan: USU press.
- Situmorang, Syafrizal Helmi dkk, 2007. *Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS)*. Medan: USU press.
- Soetomo, 2010. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Syukri, Mawardi, dan Akhmadi, 2013. *Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, 2009. *Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen dalam Negeri Republik Indonesia.
- TNP2K, 2011. *Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2011*. Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
- TNP2K, 2012. *Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2012*. Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
- TNP2K, 2013. *Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2013*. Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
- TNP2K, 2014. *Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2014*. Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri.
- Umar, Husein, 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Voss, John, 2012. *PNPM Perdesaan Evaluasi Dampak*. Jakarta: PNPM support Facility.